

**FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI NILAI INFORMASI
PELAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DENGAN
SISTEM PENGENDALIAN INTERN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING**

Oleh :

Eliza Saputri

Pembimbing : Yesi Mutia Basri dan Nur Azlina

Faculty of Economics Riau University, Pekanbaru, Indonesia

Email : elizasaputri06@gmail.com

*Factors That Influence The Value Of Financial Governmental Reporting
Information Within Internal control system as Variable moderating*

ABSTRACT

This study aims to analysis the factors that affect the value of financial reporting information local government with internal control system as a moderating variable. The study was conducted on 29 OPD located in Kampar regency in 2017. The sample used as the respondents was taken by using purposive sampling method. The Questionnaires distributed to 87 respondents, and successfully collected again with complete answers obtained from 75 respondents. The analysis tool used in this research is moderated regression analysis (MRA). The results of the tests show that the quality of human resources, utilization of information technology, and organizational commitment affect on the value of local government financial reporting information directly. While the supervision of regional finance does not affect on value of local government financial reporting information. The internal control system does not moderate affect of the Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, Local Financial Supervision, Organizational Commitment in the field of accounting to the Value of Local Government Financial Reporting Information.

Keywords : Quality of Human Resources, Utilization of Information Technology, Local Financial Supervision, Organizational Commitment, Internal Control System, Value of Local Government Financial Reporting Information.

PENDAHULUAN

Dewasa ini fenomena yang terjadi dalam perkembangan sektor publik adalah adanya tuntutan akuntabilitas terhadap lembaga dipemerintahan di pusat maupun daerah agar pemerintah mampu menyajikan laporan keuangan yang

berkualitas sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja kepada masyarakat. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (good government governance), telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik. Akuntabilitas

dapat diartikan sebagai bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik (Mardiasmo, 2009).

Masih banyaknya fenomena laporan keuangan pemerintah yang belum menyajikan data-data yang sesuai dengan peraturan dan masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah membuat tuntutan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance government*) meningkat. Hal itu juga yang telah mendorong pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk menerapkan akuntabilitas publik.

Kinerja aparat pemerintah Provinsi Riau mengalami sedikit peningkatan. Hal ini terlihat dari laporan hasil evaluasi akuntabilitas kerja pemerintah kabupaten/kota yang menyampaikan laporan akuntabilitas kerja instansi pemerintah (LAKIP) Sedangkan untuk kabupaten Kampar mendapat nilai C (46,43) yang berarti sangat rendah . Hal ini disebabkan karena realisasi APBD kabupaten kampar tahun 2014 hanya sebesar Rp2,502,654,319,841.65 atau sekitar 90,80%. Kabupaten Kampar 2014 dalam menerapkan teknologi informasi juga ditemukan adanya kelemahan, diantaranya :

- 1) keterbatasan sarana dalam mendukung E-government
- 2) kurangnya koordinasi antar unit pengolah data fungsional dengan pusat data

- 3) belum terbangunnya aplikasi program strategis dan terintegritas.

(sumber : Lakipkab.kampar 2014)

Pada tahun 2015 BPK memberikan Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas LKPD kabupaten Kampar. Opini diberikan atas dasar kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi pemerintahan kecuali untuk item nilai selisih lebih tetap aset dikecualikan untuk opini yang diberikan atas LKPD tahun 2015 pemerintah kabupaten kampar . selain opini atas laporan keuangan , BPK juga mengungkapkan adanya permasalahan-permasalahan terkait sistem pengendalian intern dan ketidakpatuhan pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada 2014 BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, yaitu:

- (1) Penyajian nilai investasi permanen – Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Kampar pada PDAM Tirta Kampar, BMT dan DKUKM belum menggambarkan kondisi senyatanya;
- (2) Persiapan Pemerintah Kabupaten Kampar menuju penerapan Laporan Keuangan berbasis akreal belum memadai;
- (3) Penatausahaan investasi non permanen dalam bentuk hewan ternak pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan tidak sesuai dengan Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (4) Pendapatan Pajak Hotel dan Pajak Restoran belum menggambarkan kondisi senyatanya;

- (5) Aset Lainnya yang disajikan dalam Neraca per 31 Desember 2014 tidak didukung dengan Dokumen yang Memadai; dan
- (6) Selisih Lebih Penyajian Nilai Aset Tetap per 1 Januari 2014 Dalam Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kampar TA 2014 belum dapat dijelaskan.

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan negara, yaitu:

- (1) Sisa Uang Persediaan Tahun Anggaran 2014 dan Potongan Pajak terlambat disetor ke Kas Daerah dan Kas Negara;
- (2) Terdapat kekurangan volume pekerjaan pada 7 (tujuh) paket pekerjaan pada Dinas Bina Marga dan Denda Keterlambatan;
- (3) Penerima Belanja Hibah TA 2014 belum menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban penggunaan dana; dan
- (4) Terdapat kelebihan pembayaran atas Biaya Penginapan pada 3 (tiga) OPD Kabupaten Kampar.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang pertama adalah kualitas sumber daya manusia dibidang akuntansi. Sistem akuntansi sebagai suatu sistem informasi membutuhkan manusia untuk menjalankan sistem yang ada. Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.

Faktor kedua yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pemanfaatan teknologi

informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan kepada sektor publik. Diharapkan dengan kemudahan penggunaan yang diberikan teknologi informasi, dapat berdampak pada penerimaan teknologi informasi, .

Faktor ketiga yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah adalah pengawasan keuangan daerah. Pengawasan merupakan salah satu cara untuk membangun dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan.

Faktor keempat yang dapat mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah komitmen yang diciptakan oleh semua komponen komponen individual dalam menjalankan operasional operasi .

Faktor kelima yang dapat mempengaruhi nilai pelaporan keuangan pemerintah daerah adalah sistem pengendalian internal. Sistem akuntansi memerlukan pengendalian internal atau dengan kata lain sistem akuntansi berkaitan erat dengan pengendalian intern organisasi (Mahmudi, 2007).

Penelitian yang pernah dilakukan Desi Indriasari (2009) di kabupaten Ogan Ilir Pemanfaatan teknologi informasi, dan pengendalian internal akuntansi memiliki pengaruh positif terhadap nilai pelaporan keuangan daerah dan Kapasitas SDM berpengaruh negatif. Sedangkan penelitian yang pernah dilakukan oleh Celviana Winidyaningrum (2010) di Pemda Subosukawonostraten, Kapasitas SDM dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap nilai pelaporan keuangan. Pemanfaatan teknologi informasi, dan

pengendalian intern berpengaruh positif terhadap ketepatan waktu pelaporan keuangan pemerintah daerah. Kapasitas SDM berpengaruh positif.

Banyaknya perbedaan penelitian dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan hasil tidak konsisten. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian Valita (2016). Maka peneliti akan melakukan penelitian kembali dengan judul “faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating (studi empiris pada OPD Kabupaten Kampar). Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah penambahan variabel independen yaitu komitmen organisasi. Dan objek serta periode penelitian yang berbeda. Pada penelitian terdahulu objeknya adalah OPD Kota Pekanbaru sedangkan penelitian ini adalah OPD Kabupaten Kampar.

Adapun rumusan masalah penelitian ini antara lain: Apakah terdapat pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara lurus ataupun dengan dimoderasi sistem pengendalian internal.?

Sesuai rumusan masalah, tujuan penelitian yaitu: Untuk menguji pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara lurus ataupun dengan dimoderasi sistem pengendalian internal.

TELAAH KEPUSTAKAAN DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah

Menurut Suwardjono (2005) nilai informasi adalah kemampuan informasi didalam laporan keuangan untuk meningkatkan pengetahuan dan keyakinan pemakai dalam pengambilan keputusan. Agar manfaat dan tujuan penyajian laporan keuangan dapat dipenuhi maka informasi yang disajikan harus merupakan informasi yang bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan dengan informasi tersebut.

Menurut Wahyono (2004) dalam menghasilkan suatu nilai informasi yang bernilai disini menyangkut dua elemen pokok, yaitu informasi yang dihasilkan dan sumber daya yang menghasilkan. Menyangkut informasi yang dihasilkan, maka informasi laporan keuangan tersebut harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak terlalu rumit bagi pemakai dan bernilai, dengan tidak menggunakan istilah - istilah yang kabur serta menggunakan klasifikasi peraturan yang lazim atau berlaku.

Kualitas Sumber Daya Manusia

Kualitas sumber daya manusia adalah kemampuan sumber daya manusia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diberikan kepadanya dengan bekal pendidikan, pelatihan, dan pengalaman yang cukup memadai (Arfianti, 2011). Penilaian kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan suatu fungsi, termasuk akuntansi dapat dilihat dari tingkat tanggungjawab dan kompetensi sumber daya tersebut.

Pemanfaatan Teknologi Informasi

Pemanfaatan teknologi informasi adalah penggunaan komputer, software/perangkat lunak, dan lainnya yang sejenis secara optimal (Wilkinson *et al.*, 2005). Teknologi informasi yang salah satu contohnya komputer dapat membantu mempercepat pekerjaan yang sedang dikerjakan, dengan menggunakan komputer akan lebih akurat dan konsisten dalam perhitungan daripada menggunakan sistem manual.

Pengawasan Keuangan Daerah

Menurut Yosa (2010) yang dimaksud dengan pengawasan adalah suatu upaya yang sistematis untuk menetapkan kinerja standar pada perencanaan untuk membandingkan kinerja aktual dengan standar yang telah ditentukan, untuk menetapkan apakah telah terjadi penyimpangan, serta untuk mengambil tindakan perbaikan yang diperlukan untuk menjamin bahwa sumber data organisasi atau pemerintahan telah digunakan secara efektif dan efisien mungkin guna mencapai tujuan pemerintahan.

Pengawasan keuangan daerah juga dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah. Sistem akan berjalan baik apabila ada pengawasan yang memastikan sistem berjalan sesuai dengan rencana, untuk mendukung kualitas laporan keuangan yang baik.

Komitmen organisasi

Komitmen organisasi adalah ikatan keterkaitan individu dengan organisasi, sehingga individu tersebut merasa memiliki organisasinya. Komitmen menunjukkan keyakinan dan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai oleh organisasi. Komitmen organisasi

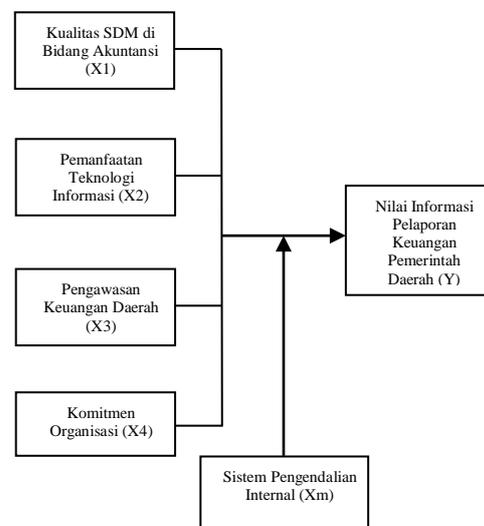
yang tinggi dapat diperlukan dalam sebuah organisasi, karena terciptanya komitmen yang tinggi akan mempengaruhi situasi kerja yang profesional.

Mowday dalam Pingka (2013) menyatakan komitmen organisasi memiliki ciri-ciri, yaitu : (1) belief yang kuat serta penerimaan terhadap tujuan dan nilai organisasi ; (2) kesiapan untuk bekerja keras ; serta (3) keinginan yang kuat untuk bertahan dalam organisasi.

Sistem Pengendalian Internal

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral yang dilakukan dilingkup pemerintahan dengan cara mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan. Pengendalian intern terdiri atas kebijakan dan prosedur yang digunakan dalam mencapai sasaran dan menjamin atau menyediakan informasi keuangan yang andal.

Gambar 1
Model Penelitian



Sumber : dibangun untuk tujuan penelitian

METODOLOGI PENELITIAN

Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh PPTK di organisasi perangkat daerah (OPD) di Kabupaten Kampar yang berjumlah 29 OPD. Sampel dalam penelitian ini adalah kepala bagian/Setingkat dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang/Setingkat pada organisasi perangkat daerah Dinas, Kantor, dan Badan di kabupaten Kampar. Dari setiap OPD akan diambil 3 responden dengan kriteria, sehingga sampel yang diambil dalam penelitian ini berjumlah 87 responden.

Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Pengumpulan data primer dilakukan melalui survei kuesioner yang diambil dari penelitian. Kuesioner tersebut akan diberikan secara langsung kepada responden yang bekerja pada OPD di Kabupaten Kampar.

Definisi Operasional Variabel dan Variabel Penelitian

Variabel Dependen

1. Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah

Nilai Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah yang bermanfaat bagi para pemakai adalah informasi yang mempunyai nilai. Agar informasi tersebut dapat mendukung dalam pengambilan keputusan dan dapat dipahami oleh para pemakai, maka informasi akuntansi harus mempunyai beberapa karakteristik kualitatif yang disyaratkan. Karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. (Yadiati, 2010).

Pengukuran variabel kepuasan kerja auditor dilakukan melalui 11 indikator yang dikutip dari Fadhillah Husna (2013).

Variabel Independen

1. Kualitas SDM dibidang Akuntansi

Menurut Wiley dalam Azhar (2007) bahwa kualitas sumber daya manusia (SDM) dimaksud dalam penelitian ini adalah kemampuan dari staf bagian akuntansi/keuangan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan yang diperoleh responden, pemahaman mengenai tugas, dan tanggung jawab terhadap kewajiban.

Pengukuran variabel kualitas sumber daya manusia dilakukan melalui 3 indikator yang dikutip dari Azhar (2007)

2. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut Wilkinson et al, dalam (Aryani, 2013), Pemanfaatan teknologi informasi merupakan penggunaan secara optimal dari komputer (mainframe, mini, micro), perangkat lunak (software), database, jaringan (internet, intranet), electronic commerce, dan jenis lainnya yang berhubungan dengan teknologi.

Pengukuran variabel pemanfaatan teknologi informasi dilakukan melalui 2 indikator yang dikutip dari Ariesta (2013).

3. Pengawasan Keuangan Daerah

Pengawasan keuangan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010).

Pengukuran variable pengawasan keuangan daerah dilakukan melalui 3 indikator yang dikutip dari Afrianti (2011).

4. Komitmen Organisasi

Menurut Fred Luthan (2005) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan keinginan kuat dan keyakinan tertentu sebagai anggota untuk bekerja keras mengikuti keinginan organisasi serta menerima nilai dan tujuan organisasi, dengan kata lain, komitmen merupakan sikap yang merefleksikan loyalitas dan proses berkelanjutan terhadap organisasi dan keberhasilan serta kemajuan yang berkelanjutan.

Pengukuran variabel komitmen organisasi dilakukan melalui 3 indikator yang dikutip dari Afrianti (2011).

HASIL DAN PEMBAHASAN PENELITIAN

Gambaran Umum Responden

Kuesioner disebarkan pada 29 kantor OPD yang berada di kabupaten Kampar secara langsung. Dari 87 kuesioner yang disebarkan, kuisisioner yang kembali sebanyak 75 kuisisioner (86,21%). Kuisisioner yang tidak direspon sebanyak 12 kuisisioner (13,79%). Kuisisioner yang dapat diolah sebanyak 75 kuisisioner (86,21%).

Hasil Uji Kualitas Data

1. Hasil Uji Validitas

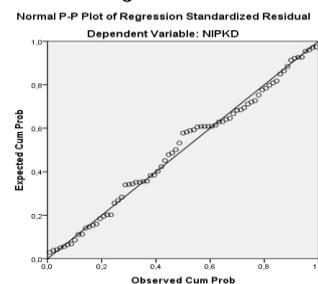
Dilihat dari uji validitas data didapatkan bahwa nilai r hitung > r tabel. Hal tersebut menunjukkan bahwa semua item pernyataan untuk variabel konflik peran, kelebihan peran, independensi, kompetensi, kecerdasan spiritual, dan kinerja auditor adalah valid.

2. Hasil Uji Realibilitas

Pengujian ini dilakukan untuk menghitung koefisien *Cronbach alpha* dari masing-masing instrumen dalam suatu variabel. Suatu pengukur dapat dikatakan dapat diandalkan apabila memiliki koefisien *Cronbach alpha* lebih dari 0,7.

Hasil Uji Normalitas

Gambar 2
Hasil Uji Normalitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Pada gambar normal probability plot, data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.

Hasil Uji Asumsi Klasik

1. Hasil Uji Multikolinieritas

Tabel 1
Hasil Uji Multikolinieritas

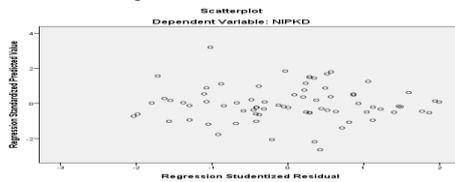
Model	Collinearity Statistics	
	Tolerance	VIF
KSDM	0,551	1,815
PTI	0,444	2,254
PKD	0,868	1,153
KO	0,387	2,582

Sumber : Data Olahan, 2017

Dari hasil perhitungan analisis diperoleh nilai *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai VIF < 10 maka dinyatakan tidak ada korelasi sempurna antar variabel bebas dan sebaliknya (Ghozali, 2011). Hal ini dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini bebas dari multikolinieritas.

2. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Gambar 3
Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Data Olahan, 2017

Terlihat titik-titik tidak membentuk pola tertentu dan menyebar secara acak diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y. Dapat diartikan tidak terdapat heterokedastisitas dalam model regresi penelitian ini.

Hasil Uji Hipotesis

1. Hasil Pengujian Hipotesis Pertama

Hasil analisis regresi dapat dilihat melalui uji t. analisis yang dilakukan diperoleh nilai t hitung variabel kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi sebesar 2,251 dan signifikan 0,015. Dikarenakan t hitung (2,251) > t tabel (1,994) dan Signifikan (0,015) < 0,05. Artinya variabel kualitas sumber daya manusia dibidang akuntansi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

. Adanya koefisiensi β sebesar 0,286 menyatakan adanya pengaruh positif kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin baik kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi pada OPD Kabupaten Kampar maka nilai informasi dari pelaporan keuangan

yang dihasilkan pemerintah akan semakin baik pula.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Fadila Ariesta (2013) membuktikan secara empiris bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah yang dinyatakan dengan keterandalan dan ketepatanwaktuan.

2. Hasil Pengujian Hipotesis Kedua

Hasil analisis regresi dapat dilihat melalui uji t. Analisis yang dilakukan diperoleh nilai t hitung variabel kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi sebesar 2,173 dan signifikan 0,033. Dikarenakan t hitung (2,173) > t tabel (1,994) dan Sig. (0,033) < 0,05. Artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Pemanfaatan teknologi informasi sangat dibutuhkan untuk memproses informasi bahkan untuk mengakses informasi terutama untuk informasi laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Kampar. Adanya koefisiensi β sebesar 0,327 menyatakan adanya pengaruh positif pemanfaatan teknologi informasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Sehingga dapat dikatakan bahwa semakin tinggi pemanfaatan teknologi informasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Febriady Leonard Sembiring (2013) membuktikan secara empiris bahwa pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan daerah

yang dinyatakan dengan keterandalan dan ketepatan waktu.

3. Hasil Pengujian Hipotesis Ketiga

Nilai t hitung variabel kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi sebesar 1,107 dan signifikan 0,272. Dikarenakan t hitung (1,107) < t tabel (1,994) dan Sig. (0,272) > 0,05.. Artinya variabel pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah

Hasil penelitian ini sama dengan penelitian yang dilakukan oleh Arfianti (2011) tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah, yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah tidak memberikan pengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

4. Hasil Pengujian Hipotesis Keempat

Hasil analisis regresi dapat dilihat melalui uji t . Analisis yang dilakukan diperoleh nilai t hitung variabel komitmen organisasi sebesar 2,338 dan signifikan 0,022. Dikarenakan t hitung (2,338) > t tabel (1,994) dan Sig. (0,022) < 0,05. Artinya variabel komitmen organisasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara komitmen organisasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hasil penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Sugandhi (2013) juga menunjukkan hasil bahwa komitmen organisasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

5. Hasil Pengujian Hipotesis Kelima

Diketahui t hitung (1,120) < t tabel (1,997) dan Sig. (0,138) > 0,05. Artinya variabel kualitas SDM di bidang akuntansi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Arens (2003) kemampuan sumber daya manusia dalam menghasilkan laporan keuangan yang memiliki nilai informasi dapat dirancang melalui sistem pengendalian intern dengan tujuan umumnya adalah efisiensi dan efektivitas operasi. Pengendalian dalam organisasi akan mendorong pemakaian sumber daya, mencakup personil, secara efisien dan efektif untuk mengoptimalkan sasaran-sasaran organisasi.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fikri (2015) yang menyatakan bahwa kompetensi aparatur pada OPD di Pemprov NTB tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan melalui sistem pengendalian internal.

6. Hasil Pengujian Hipotesis Keenam

Diketahui t hitung (0,576) < t tabel (1,997) dan Sig. (0,212) > 0,05. Artinya variabel pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian intern digunakan sebagai variabel moderasi hasilnya menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak mampu menjadi pemoderasi dalam hubungan pemanfaatan teknologi informasi dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini bisa saja disebabkan kurang efektifnya sistem pengendalian internal pada OPD Kabupaten Kampar.

Hal ini sangat bertentangan dengan Arens (2003) pemanfaatan teknologi informasi oleh entitas dapat meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pengendalian intern dengan secara konsisten memproses sejumlah besar volume transaksi data sehingga teknologi informasi dapat meningkatkan ketepatan waktu dan akurasi dari informasi.

Hasil penelitian ini konsisten dengan penelitian yang dilakukan oleh Galuh (2013) yang menyatakan bahwa pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara tidak langsung melalui sistem pengendalian intern.

7. Hasil Pengujian Hipotesis Ketujuh

Diketahui nilai t hitung 0,658 dan signifikan 0,513. Kemudian t tabel (taraf nyata 5%) dapat diperoleh t hitung (0,658) < t tabel (1,995) dan Sig. (0,513) > 0,05. Artinya variabel

pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengendalian intern tidak memoderasi hubungan antara pengawasan keuangan daerah dengan nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini sesuai dengan fakta dilapangan, dimana pada setiap OPD Kabupaten Kampar telah memiliki pengawasan keuangan daerah yang baik tapi yang menjadi permasalahannya yaitu personil atau manajemen tidak berkualitas dalam sistem pengendalian intern sehingga tidak menjamin laporan keuangan pemerintah daerah berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketidaktahuan dan ketidakpahaman aparat tentang kode etik yang ada di tempat kerjanya.

Menurut Arens (2003) pengawasan yang berjalan dengan baik akan menghasilkan kualitas laporan keuangan yang baik.

Namun hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Galuh (2013) yang menunjukkan bahwa pengawasan keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian intern.

8. Hasil Pengujian Hipotesis Kedelapan

Diketahui nilai t hitung (0,472) < t tabel (1,997) dan Sig. (0,301) > 0,05. Artinya variabel komitmen organisasi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern tidak

berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal adalah suatu proses integral yang dilakukan dilingkup pemerintahan dengan cara mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, serta berperan penting dalam pencegahan tindakan yang tidak sesuai dengan aturan.

Sistem pengendalian intern akuntansi berfungsi untuk mengatur teknik akuntansi seperti perubahan dalam pendekatan sistem akuntansi dan prosedur pencatatan, dokumen dan formulir yang digunakan, fungsi fungsi otorisasi untuk tujuan pengendalian intern, laporan serta pengawasan. Dengan demikian komitmen organisasi yang baik tidak diperkuat dengan sistem pengendalian intern yang memadai maka akan menghasilkan nilai informasi laporan keuangan yang kurang baik dan relevan. Berdasarkan uraian di atas, tidak terdapat pengaruh antara komitmen organisasi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah melalui sistem pengendalian informasi.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

1. Kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
2. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
3. Pengawasan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan

pemerintah daerah.

4. Komitmen organisasi berpengaruh terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
5. Kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
6. Pemanfaatan teknologi informasi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
7. Pengawasan keuangan daerah yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.
8. Komitmen organisasi yang dimoderasi oleh sistem pengendalian intern tidak berpengaruh signifikan terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah.

Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian dan tidak hanya pada aparat pemerintah daerah di dinas-dinas saja, tetapi dapat dilakukan pada aparat pemerintah daerah di seluruh OPD kota atau provinsi.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan metode wawancara langsung pada masing-masing responden dalam upaya mengumpulkan data, sehingga dapat menghindari kemungkinan responden tidak objektif dalam mengisi kuisioner.
3. Penelitian ini hanya menggunakan empat variabel independen dan

satu variabel moderasi, yaitu kualitas SDM di bidang akuntansi, pemanfaatan teknologi informasi, pengawasan keuangan daerah, komitmen organisasi, dan sistem pengendalian intern. Oleh karena itu, diharapkan pada penelitian selanjutnya yang ingin meneliti dengan topik yang sama agar dapat menambahkan variabel yang lain yang mungkin dapat mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah agar hasil yang diperoleh lebih akurat dan bervariasi.

DAFTAR PUSTAKA

- Alimbudiono, Ria Sandra & Fidelis Arastyo Andono, 2004. *Kesiapan Sumber Daya Manusia Sub Bagian Akuntansi Pemerintah Daerah "XYZ" dan Kaitannya Dengan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Kepada Masyarakat: Renungan Bagi Akuntan Pendidik*, Jurnal Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik. Vol. 05 No. 02. Hal. 18-30
- Allen, N.J. dan J.P. Meyer. 1991. The measurement and Antecedents of affective, Continuance and Normative Commitment to the Organizational. *Journal of occupational psychology*. 63 (1):1-18.
- Andriani, Wiwik, 2010. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Jurnal Akuntansi. Politeknik Negeri Padang
- Ardi Hamzah, 2009, pengaruh ekspektasi kinerja, ekspektasi usaha, faktor sosial sesuai tugas dan kondisi yang memfasilitasi pemakai terhadap minat pemanfaatan sistem informasi (studi empiris pada pemerintahan kabupaten di pulau madura), Simposium Nasional Teknologi Informasi, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Arens, Alvin A, Randal J Elder & Mark S Beasley. 2008. *Auditing dan Jasa Assurance Pendekatan Terintegrasi*, Jakarta: Erlangga
- Arfianti, Dita, 2011. *Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah*, Skripsi. Universitas Diponegoro, Semarang
- Ariesta, Fadila, 2013. *Pengaruh kualitas sumberdaya manusia, pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*, Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang
- Armando, Gerry, 2013. *Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*

- Daerah*, Jurnal Akuntansi. Universitas Negeri Padang.
- BPK Provinsi Riau, 2014. *Siaran Pers*, Didownload dari Situs <http://pekanbaru.bpk.go.id>. 20 Oktober 2015
- Delanno, Galuh Fajar, 2012. *Pengaruh Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Pengawasan Keuangan Daerah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Padang Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening*, Skripsi. Universitas Negeri Padang.
- Ghozali, Imam, 2009. *Ekonometrika: Teori, Konsep dan Aplikasi dengan SPSS 17*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Ghozali, Imam, 2012. *Aplikasi Analisis Multivariabel Dengan Program SPSS*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro
- Griffin, 2004. *Komitmen Organisasi*, Terjemahan, Jakarta :Erlangga
- Haryanto dkk,(2007),*Akuntansi Sektor Publik*.Edisi pertama.Universitas Diponegoro.
- Hevesi,G. Alan,2005. *Standars for internal control in new york state Government*. <http://www.osc.state.ny.us>.
- Husna, Fadhilla, 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pengawasan Keuangan Daerah, dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Terhadap Nilai Informasi Pelaporan Keuangan Pemerintah*, Jurnal Akuntansi, Universitas Negeri Padang
- Indriasari, Desi dan Ertambang Nahartyo, 2008. *Pengaruh Kapasitas Sumberdaya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Pengendalian Intern Akuntansi Terhadap Nilai InformasiPelaporan Keuangan Daerah*, Pontianak : *Jurnal SNA*
- Jensen & Mecking, 1976, *The Theory of the firm: Manajerial behaviour, Agency Cost, and Ownership Structure*, journal of financial and Economics, 3:305-360
- Jogiyanto, HM,2009. *Sistem Teknologi Informasi*, Andi, Yogyakarta
- Luthans,Fred, 2005. *Perilaku organisasi*, edisi sepuluh,diterjemahkan oleh : vivin andhika yuwono; Shekar Purwanti; th.Arie Prabawatui; dan Winong Rosari. Penerbit Andi, Yogyakarta.
- Mardiasmo, 2006.*perpajakan,edisi Revisi,penerbit Andi ,Yogyakarta*.
- Mardiasmo, 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Ed. IV, Andi ,Yogyakarta

- Murty, Hudiwinarsih. 2012. Pengaruh kompensasi, motivasi, dan komitmen organisasional terhadap kinerja karyawan bagian akuntansi (studi kasus pada perusahaan manufaktur di Surabaya). *Jurnal The Indonesian Accounting Review* vol. 2. STIE perbanas. Surabaya.
- Mowday, R.T., Porter L.W., dan Steers, R.m., 1979, *Employee-organizational linkages : the psychology of commitment, Absenteeism and turnover*. academic press, New York.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2010 Tentang Pengawasan Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Informasi Keuangan Daerah
- , Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- , Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
- Rosalin, Faristina, 2011. *FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI LEAMDALAN DAN TIMELESS PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMU (Studi pada BL di kota Semarang)*. skripsi Universitas Diponegoro : Semarang
- Roshanti., Sujana, dan Sinarwati, 2014. *Pengaruh kualitas SDM, pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pengendalian intern terhadap nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah*, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Pendidikan Ganesha
- Sembiring, Febriady Leonard, 2013. *Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerinta*, *Jurnal Akuntansi*, Universitas Negeri Padang
- Soegiarto Soekidjan, Sp. KJ. (2009), *komitmen Organisasi*

- sudahkah menjadi bagian dari kita.
- Steers, R.M dan Porter L. W.(1987). *Motivaton and Leadership at work*. New yok.McGraw Hill.
- Sugiyono,2004. *Metode Penelitian Bisnis*: Penerbit CV.Alfabet: Bandung .
- Suwardjono, 2005. *Teori Akuntansi : Perencanaan Pelaporan Keuangan*, Edisi Ketiga, BPFE, Yogyakarta
- Tuasikal, Askam, 2007. *Pengaruh Pengawasan, Pemahaman Sistem Akuntansi Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Kinerja Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah Pada Kabupaten dan Kota di Propinsi Maluku*, Jurnal Keuangan dan Perbankan, Vol. 10 No. 1 Hal. 66-82
- Wahyono,Teguh,2004. *Sistem Informasi (konsep Dasar,Analisis, Desain dan Implementasi*.Graha ilmu, Yogyakarta
- Winidyaningrum, Celviana, 2010. *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi*, Skripsi, Universitas Diponegoro
- Yadiati, Prof. Dr. Winwin, 2010. *Teori Akuntansi*, Edisi Pertama, Jakarta: Penerbit Kencana Prenada Media Group
- Yosa, 2010. *Penelitian Pengawasan*, www.ltjenkemdagri.go.id (diakses pada tanggal 20 Oktober 2015)